

ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PERIODE 2020-2023

Sellamerlita¹, Diskhamarzawen², Rina Andriani³

^{1,2,3}Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

E-mail: sellamerlita@gmail.com , diz.zha@gmail.com , rinaandriany85@gmail.com

Article History

Received: 03-07-2025

Revision: 05-07-2025

Accepted: 17-07-2025

Published: 20-07-2025

Abstract. *This study aims to determine the financial performance of the Kuantan Singingi Regency Government for the 2020-2023 period when measured using the Value For Money concept. Value For Money is a concept of managing public sector organizations that is based on 3 main elements, namely economy, efficiency, and effectiveness. This research was conducted in the Kuantan Singingi Regency Government by taking secondary data in the form of the Budget Realization Report in Kuantan Singingi Regency for the 2020-2023 Fiscal Year.*

Based on the results of research on measuring financial performance using the concept of value for money, it shows that, (1) from the economic element, it can be seen that in the 2020-2023 budget period, the Kuantan Singingi Regency Government has been able to make savings with an economic ratio of 85% -100%, which means it is in the fairly economical criteria; (2) from the budget efficiency element, it can be seen that in 2020-2022 the budget efficiency is in the efficient criteria with an efficiency ratio of 90% -99%, but in 2023 the efficiency ratio is in the inefficient criteria, because the ratio is above 100%; (3) from the revenue effectiveness element, it can be seen that in 2020-2023 the revenue in Kuantan Singingi Regency falls into the fairly effective criteria of 85% -99%, even in 2023 the effectiveness ratio falls into the effective category because in 2023 it is above 100%.

Keywords: *Value for money, Financial Performance, Budget Realization Report.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2020-2023 jika diukur menggunakan konsep *Value For Money*. *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengambil data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020-2023.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *value for money* menunjukkan bahwa, (1) dari elemen ekonomis dapat diketahui periode tahun anggaran 2020-2023 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah mampu melakukan penghematan dengan rasio ekonomis sebesar 85%-100% yang artinya berada pada Kriteria cukup ekonomis; (2) dari elemen efisiensi anggaran dapat diketahui pada tahun 2020-2022 efisiensi anggaran nya berada pada kriteria efisien dengan rasio efisiensi sebesar 90%-99%, namun pada tahun 2023 rasio efisiensi berada pada kriteria tidak efisien, karena rasionya berada di atas 100%; (3) dari elemen efektivitas pendapatan dapat diketahui pada tahun 2020-2023 pendapatan di Kabupaten Kuantan Singingi masuk kriteria cukup efektif 85%-99%, bahkan pada tahun 2023 rasio efektivitas masuk kategori efektif karena pada tahun 2023 berada diatas 100%.

Kata Kunci: *Value for money, Kinerja Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang mengatur segala kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat disuatu daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada suatu daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan potensi yang ada disuatu daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. (UUD No 23 Tahun 2014)

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu organisasi, individu, atau proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengumpulan, analisis dan interpretasi data terkait hasil kerja untuk memastikan sejauh mana target yang telah ditentukan dapat dicapai.

Value for Money dalam konteks ekonomi daerah merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai sistem pemerintahan yang baik. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik.

Para pengelola pemerintah seringkali mengukur keberhasilan instansi pemerintah hanya berdasarkan kemampuan mereka dalam menghabiskan anggaran, dengan asumsi bahwa mencapai 100% penyerapan anggaran menandakan keberhasilan. Namun, penekanan hanya pada aspek *input* ini seringkali mengabaikan *output* dan hasil akhir (*outcome*). Sementara itu, harapan masyarakat terkait keberhasilan lebih berfokus pada tindakan nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pembangunan, kesejahteraan warga miskin, dan kualitas layanan publik.

Dalam beberapa kasus, anggaran yang direncanakan tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas di daerah, sehingga program-program yang dibuat tidak efektif dalam mengatasi masalah lokal. Korupsi dan penyalahgunaan anggaran juga menjadi salah satu hal yang dapat menyebabkan anggaran yang ditetapkan tidak ter realisasi dengan maksimal. Banyak kasus dimana anggaran di salahgunakan, baik penggelembungan biaya, alokasi anggaran fiktif, maupun pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi. Hal ini menyebabkan realisasi penggunaan anggaran tidak mencapai target sampai akhir tahun atau sampai target yang ditetapkan, sehingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang ekonomis, efisiensi, dan efektif sering tidak tercapai.

Tetapi permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah adanya pemborosan penggunaan anggaran belanja yang dibelanjakan dan tentu saja tidak tepat sasaran yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Sebagai contoh, proyek pembangunan Tiga Pilar di Kuantan Singingi tanpa manfaat yang

dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Proyek pembangunan Pasar Tradisional Berbasis Modren, Universitas Islam Kuantan Singing (UNIKS) dan Hotel Kuansing, yang mana pembangunan ketiga Pilar tersebut dimulai sejak tahun 2014 dan sampai saat ini tidak kunjung selesai atau mangkrak. Dari ketiga pilar pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut hanya ada satu proyek yang sudah dapat di gunakan pada saat ini, yakni Pasar Tradisional Berbasis Modren yang mulai digunakan pada Rabu 10 Juli tahun 2019. Pada saat itu Pemerintah mengumumkan dengan resmi bahwa Pasar Tradisional Berbasis Modren Kabupaten Kuantan Singingi dapat di fungsikan oleh masyarakat Kuansing. Proyek ini menghabiskan anggaran pembangunan sebesar 44 Miliar. (*Kuansing.go.id*, 12 juli 2019)

Dari proyek pembangunan Tiga Pilar di Kuansing, dua proyek lainnya yaitu Universitas islam Kuantan Singingi (UNIKS) dan Hotel Kuansing sampai saat ini tidak kunjung selesai atau mangkrak, sejak tahun 2014 mulai pembangunannya. Kedua pembangunan proyek ini mengeluarkan anggaran yang cukup besar, seperti pada Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) menghabiskan anggaran pembangunan sebesar 51 Miliar, dan ada penambahan anggaran pada tahun 2015 sebesar 23 Miliar. Untuk pembangunan Hotel Kuansing menghabiskan anggaran sebesar 41 Miliar, dan ada penambahan anggaran sebesar 8 Miliar pada tahun 2015. Sampai saat ini, kedua proyek tersebut kurang lebih menghabiskan anggaran sebesar 123 Miliar, tetapi Proyek tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi warga Kabupaten Kuantan Singingi karena tak kunjung selesai dan difungsikan, akibatnya kedua proyek tersebut terbengkalai. (<http://news.detik.com> , 20 Mei 2021)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang nantinya hasil dari penelitian ini dapat menggambarkan seberapa ekonomis, efisiens dan efektivitas kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang di lihat dari Anggaran yang telah di tetapkan dan Realisasi yang ada di lapangan, dan bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang nantinya akan diukur dengan menggunakan pendekatan *Value For Money*. Adapun judul yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah “**Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2023**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi focus penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2020- 2023 diukur dengan menggunakan pendekatan *Value ForMoney*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui “Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2020-2023 yang diukur dengan menggunakan Konsep *Value ForMoney*.”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai dengan tujuan, standar dan kriteria tertentu. Istilah ini sering digunakan untuk mengukur pencapaian hasil dalam konteks pekerjaan, bisnis, atau organisasi.

Menurut Silaen, (2021:2), Kinerja adalah “Prestasi yang dicapai seseorang disebut *actual*

performance atau *job performance* yang biasa kita sebut sebagai kinerja. Seorang karyawan yang melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan serta berhasil secara kualitas maupun kuantitas disebut juga dengan kinerja. Prestasi kerja seseorang berdasarkan kuantitas dan kualitas yang telah disepakati bersama merupakan pengertian kinerja secara umum.

Sedangkan Pengukuran kinerja adalah suatu pendekatan *sistematis* untuk menilai sejauh mana suatu organisasi, proyek, atau individu mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan. Konsep ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan *interpretasi* data kinerja untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan dampak suatu entitas dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, pengukuran kinerja memberikan gambaran objektif tentang sejauh mana pencapaian tujuan telah terjadi dan seberapa baik sumber daya telah dimanfaatkan. (Judijanto, 2024:16)

Sebagai suatu proses yang berkesinambungan, Sebagai suatu proses pengukuran kinerja tidak hanya terfokus pada hasil akhir, tetapi juga melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap proses-proses yang mendukung pencapaian tujuan. Dalam era yang ditandai oleh tuntutan transparansi dan akuntabilitas, pengukuran kinerja menjadi alat penting dalam mengoptimalkan operasional dan meningkatkan kualitas layanan atau produk yang disediakan oleh suatu entitas.

2.1.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu individu, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan relevan dengan tujuan strategi. Indikator kinerja juga dapat didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), proses (*Process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

2.1.3 Pengukuran Kinerja

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud: Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintahan. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Adapun beberapa elemen-elemen pokok dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- 2) Merumuskan Indikator dan ukuran kinerja Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja

secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi- indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama (*critical success factors*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*). Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi.

- 3) Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-Sasaran Organisasi, Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan.
- 4) Evaluasi Kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan *feedback dan reward punishment*, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

2.1.4 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Ibnu Syamsi,(2017: 199).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

2.1.5 Pengertian Anggaran

Anggaran adalah rencana keuangan yang menggambarkan perencanaan organisasi untuk masa depan, sering kali dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam nilai uang.

Ini merupakan alat perencanaan jangka pendek yang menerjemahkan program-program menjadi rencana keuangan yang lebih konkret dan terukur. Proposal anggaran biasanya melalui peninjauan oleh pihak berwenang sebelum menjadi anggaran resmi. Di sektor publik, anggaran membantu menentukan kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Kebijakan fiskal pemerintah sering kali termanifestasi melalui alat utama ini.

Penyusunan anggaran di sektor publik juga berperan dalam menciptakan akuntabilitas. Anggaran ini, sebagai rencana keuangan, memberikan standar untuk mengukur kinerja. Meskipun sebatas rencana, pengukuran kinerja berdasarkan anggaran ini berguna untuk mengevaluasi ekonomi dan efisiensi. Namun, evaluasi efektivitas kegiatan seharusnya melibatkan hasil, manfaat, dan dampak yang dihasilkan. (Judijanto, 2024:55)

2.1.6 Tujuan, Manfaat dan Kelemahan Anggaran

Pada dasarnya anggaran disusun untuk membantu perusahaan, khususnya bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan dan menentukan suatu tindakan yang akan diambil guna melangsungkan kegiatan usahanya. Beberapa tujuan anggaran yaitu:

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
- b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
- d. Erasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.
- f. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuntungan.

Menurut (Ahadiati 2022:11), menerangkan tentang manfaat anggaran antara lain: Manfaat anggaran dalam organisasi/perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Dapat ditentukannya kegiatan yang profitable
- b. Membantu manajemen dalam mengelola perusahaan
- c. Dapat mengkoordinasi seluruh aktivitas perusahaan

2.1.7 Value For Money

Menurut Mardiasmo (2018:5), *vaue for money* adalah konsep yang digunakan dalam suatu organisasi sektor publik yang dikelola berdasarkan tiga komponen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi akan membandingkan *input* berupa masukan dengan *input value* dalam satuan moneter. Ekonomi sering juga disebut *input* yang diperoleh dengan kualitas dan kuantitas dengan menggunakan harga terendah. Elemen Efisiensi adalah *output* yang dicapai secara maksimal dengan *input* yang serendah mungkin dalam mencapai *output* tertentu. Secara sederhana, efisiensi adalah perbandingan *output* dengan *input* yang dihubungkan dengan target kinerja yang telah ditentukan. Sedangkan efektivitas adalah tingkat hasil program yang dicapai berdasarkan target yang ditentukan. Efektivitas adalah membandingkan *outcome* dan *output*.

Konsep pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Elemen pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik, meliputi: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tujuan pelaksanaan *value for money* yang dikehendaki oleh masyarakat adalah pertanggungjawaban yaitu ekonomi yang hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi berdaya guna dalam penggunaan sumber daya yaitu menggunakan sumber daya yang diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan dan

efektivitas yang berhasil guna dengan artian dapat mencapai tujuan dan sasaran.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut *teori Groundded* yaitu sebuah metode atau pendekatan yang bertujuan untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang di kumpulkan dari lapangan. Teori ini muncul melalui pengumpulan dan analisis data yang terjadi secara bersamaan, tanpa memulai hipotesis awal yang kuat. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi dari kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi jika dilihat atau dinilai menggunakan Rasio *Value for Money* dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupa data-data Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi provinsi Riau. Dalam proses penelitian ini, peneliti memulainya pada bulan Oktober tahun 2024 dengan pengumpulan data awal di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut Sailen (2018:87) "Populasi adalah keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti atau menunjukan seluruh kelompok orang atau suatu kejadian yang menjadi ketertarikan peneliti untuk di investigasi dan dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga disebut univesem (universe) yang berarti keseluruhan, dapat berupa benda hidup ataupun benda mati". Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan singingi.

3.3.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2016:118), sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiyono (2017:81), sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan singingi tahun 2020-2023.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif adalah metode dengan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan dengan melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari

observasi hingga penyusunan laporan.

3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yakni :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang didapat secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara. Data primer dalam penelitian ini gambaran umum dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi yang bersumber langsung dari objek penelitian dan website *kuansing.co.id*

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer sesudah diolah dan data yang bersumber dari laporan yang telah dibuat oleh pihak lain. Data sekunder yaitu data-data yang berasal dari perusahaan yang berupa bukti, laporan historis yang tersusun dalam arsip dan hal-hal yang berkenaan materi pembahasan skripsi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020-2023.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait, serangkaian informasi dan dokumennya berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020-2023.

2. Observasi

Teknik Observasi, Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang ada. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui keadaan keuangan dan realisasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisa data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, member kode atau tanda. Analisa data yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan melalui beberapa tahapan terhadap dokumen terdahulu.

Pada tahap awal, penelitian ini dilakukan pengumpulan data sampel melalui sumber data berupa dokumen laporan keuangan, kemudian data tersebut diolah dan dihitung dengan menggunakan rasio guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan. Hasil perhitungan rasio yang sudah diperoleh kemudian disusun dalam bentuk analisis deskriptif guna menjelaskan makna dari angka-angka yang diperoleh dari hasil perhitungan tersebut. Dalam hal ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode rasio *Value for Money* dengan membandingkan hasil dari perhitungan rasio terhadap Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Langkah-langkah yang dibuat penulis dalam teknik analisis data ini adalah :

- 1) **Collecting/Pengumpulan data**, berkaitan dengan laporan realisasi anggaran Kabupaten Kuantan Singingi yang diperoleh dari hasil observasi.
- 2) **Reduksi data**, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada laporan realisasi anggaran instansi. Terlebih

dahulu peneliti mengklarifikasi data realisasi dan anggaran yang telah diperoleh, kemudian mengolah serta menghubungkan semua data yang telah diperoleh dengan teori yang ada. Pengukuran kinerja keuangan ditinjau menggunakan metode *value for money* dengan menghitung rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas anggaran pendapatan dengan menggunakan data yang diperoleh.

- 3) **Penyajian data**, sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berupa analisis dalam bentuk uraian singkat, sehingga peneliti dapat menguasai data. Penyajian data ini dilakukan dengan evaluasi kinerja keuangan berdasarkan laporan realisasi dan anggaran yang telah dianalisis.
- 4) **Penarikan kesimpulan**, melakukan simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Value for Money dalam pengukuran kinerja keuangan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisa Data Pengukuran Kinerja Dengan Value For Money

Pengukuran kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan metode *Value For Money* yang diukur dengan menggunakan Rasio Ekonomis, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektif.

1. Rasio Ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomis yaitu tingkat biaya yang dikeluarkan sektor publik untuk melakukan suatu pelayanan publik. Tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggarannya.

Tabel 4.5
Rasio Ekonomis Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2023
Berdasarkan Analisis Value For Money

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Target Anggaran Belanja	Rasio Ekonomis	Kriteria
2020	1.413.853.295.169,37	1.544.453.712.486,57	91,54%	Cukup Ekonomis
2021	1.283.857.982.319,90	1.448.495.292.659,00	88,63%	Cukup Ekonomis
2022	1.257.939.014.018,32	1.433.830.618.350,00	87,73%	Cukup Ekonomis
2023	1.546.133.123.161,19	1.665.744.072.125,00	92,82%	Cukup Ekonomis

Sumber : LRA data di olah peneliti, 2025

Pada tabel 4.5 di atas dapat di lihat bahwa pengukuran kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2020 sampai 2023 tidak mengalami perubahan kriteria, Setiap tahunnya tergolong kriteria cukup ekonomis. Pada tahun 2020, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah memeuhi kriteria Ekonomis, hal ini di tunjukkan dengan data target anggaran belanja daerah sebesar Rp. 1.544.453.712.486,57 dan Realisasinya sebesar Rp. 1.413.853.295.169,37 dengan persentase 91,54% dan tergolong cukup ekonomis karena persentase berada di bawah 100%. Pada tahun 2021 Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan target anggaran sebesar Rp 1.448.495.292.659,00 dan Realisasinya Rp. 1.283.857.982.319,90 dengan persentase 88,63% megalami penurunan di dibandingkan dengan tahun 2020, tetapi walaupun menurun rasio ekonomis pada tahun 2021 masih tergolong cukup ekonomis. Pada tahun 2022 kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kembali mengalami penurunan di dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini di lihat dari target anggaran sebesar Rp.

1.433.830.618.350,00 dan realisasi Rp. 1.257.939.014.018,32 dengan persentase 87,73% dan masih tergolong dalam kriteria cukup ekonomis walaupun persentase ini menjadi angka terendah dalam 4 tahun terakhir, karena pada tahun 2022 realisasi belanja yang dapat di capai oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi jauh dari target anggaran belanja yang telah di siapkan. Pada tahun 2023 target anggaran sebesar Rp. 1.665.744.072.125,00 dan realisasinya Rp. 1.546.133.123.161,19 dengan persentase 92,82% mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun 2022 dan tergolong ke dalam kriteria cukup ekonomis karena persentasenya masih kurang dari 100%.

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani (2015;275). Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan akan semakin efisien apabila rasio yang di capai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Tabel 4.7
Rasio Efisiensi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2023
Berdasarkan Analisis Value For Money

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kriteria
2020	1.413.853.295.169,37	1.449.815.113.991,58	97,51%	Efisien
2021	1.283.857.982.319,90	1.347.161.271.589,96	95,30%	Efisien
2022	1.257.939.014.018,32	1.313.503.378.951,59	95,76%	Efisien
2023	1.546.133.123.161,19	1.544.437.160.460,62	100,10%	Tidak Efisien

Sumber : LRA data di olah peneliti, 2025

Pada tabel 4.7 di atas menunjukkan pengukuran kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 di lihat dari kriteria efisiensi adalah mengalami perbaikan. Pada tahun 2020 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi di lihat dari realisasi anggaran pendapatan daerah sebesar Rp. 1.449.815.113.991,58 dan realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 1.413.853.295.169,37 dengan persentase rasio efisiensi 97,51%, hal ini tergolong efisien karena persentasenya berada di antara 90-99%. Pada tahun 2021 persentase rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari realisasi anggaran Pendapatan daerah sebesar Rp. 1.347.161.271.589,96 dan realisasi anggaran belanja Rp. 1.283.857.982.319,90 dengan persentase rasio efisiensinya 95,30%, hal ini tergolong efisien karena persentasenya berada di antara 90-99%. Pada tahun 2022 persentase rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari realisasi anggaran pendapatan daerah sebesar Rp. 1.313.503.378.951,59 dan realisasi anggaran belanja daerah Rp. 1.257.939.014.018,32 dengan persentase rasio efisiensinya sebesar 95,76%, hal ini tergolong efisien karena persentasenya berada diantara 90-99% sama seperti 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kenaikan yang cukup signifikan yang mana

realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.544.437.160.460,62 dan realisasi anggaran belanja daerah Rp. 1.546.133.123.161,19 dengan persentase efisiensinya sebesar 100,10% dan hal ini tergolong tidak efisien karena persentasenya melebihi nilai 100%, yang mana dalam penjelasan kriteria yang melebihi 100% maka kinerja keuangan Pemerintah pada saat itu tidak efisien. Karena, semakin kecil presentase rasio efisien maka kinerja keuangan pemerintah semakin baik. Selain itu, pada tahun 2022, 2023 dan 2024 APBD Kabupaten Kuantan Singingi mengalami keterlambatan dalam pengesahannya. Keterlambatan pengesahan APBD di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan perlunya perbaikan dalam koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif, serta penegakkan disiplin dalam proses perencanaan dan penganggaran keuangan Daerah.

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Tabel 4.9
Rasio Efektivitas Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2023
Berdasarkan Analisis Value For Money

Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan	Target Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kriteria
2020	1.449.815.113.991,58	1.534.938.782.844,23	94,45%	Cukup Efektif
2021	1.347.161.271.589,96	1.401.383.714.230,00	96,13%	Cukup Efektif
2022	1.313.503.378.951,59	1.377.801.049.788,00	95,33%	Cukup Efektif
2023	1.544.437.160.460,62	1.537.905.106.454,00	113,73%	Efektif

Sumber : LRA data di olah peneliti, 2025

Pada tabel 4.9 di atas menunjukkan pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 di lihat dari kriteria efektivitas adalah efektif. Pada tahun 2020 rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari target anggaran pendapatan daerah sebesar Rp. 1.534.938.782.844,23 dan realisasinya Rp. 1.449.815.113.991,58 dengan persentase efektivitasnya Sebesar 94,45%, hal ini tergolong cukup efektif karna persentasenya di antara 85-99%. Pada tahun 2021 rasio efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2020 yang mana target pendapatan daerah sebesar Rp. 1.401.383.714.230,00 dan realisasinya Rp. 1.347.161.271.589,96 yang mana persentase efektivitasnya sebesar 96,13% dan hal ini tergolong cukup efektif karena persentasenya di antara 85-99%. Pada tahun 2022 rasio efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan di bandingkan dengan tahun 20021 yang mana persentase tahun 2022 sebesar 95,33%, hal ini di sebabkan target pendapatan daerah Rp. 1.377.801.049.788,00 lebih besar di bandingkan realisasinya Rp. 1.313.503.378.951,59 dan hal ini tergolong cukup efektif karena persentasenya masih berada di antara 85-99%%. Pada tahun 2023 rasio efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan yang signifikan dengan presentase 113,73%, hal ini di sebabkan target pendapatan daerah Rp. 1.537.905.106.454,00

lebih kecil di bandingkan dengan realisasinya Rp. 1.544.437.160.460,62 dan hal ini tergolong efektif karena persentasenya berada di atas 100%, dengan kata lain pendapatan yang diperoleh melebihi target yang di tetapkan.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis *Value For Money* dalam Pengukuran Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2020-2023, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2020-2023 berdasarkan *Analisis Value For Money* untuk rasio ekonomis berada pada rasio 85%-100% dan masuk ke dalam kategori cukup ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah sudah digunakan seminimal mungkin dan sudah merealisasikan anggaran tersebut untuk program/kegiatan yang sudah di tetapkan.
2. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2020-2023 berdasarkan *Analisis Value For Money* untuk rasio efisiensi berada pada rasio 90%-99% dan masuk ke dalam kategori efisien. Hal ini menunjukkan bahwa menunjukkan pengelolaan anggaran belanja sudah memenuhi syarat efisien yaitu penggunaan yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum. Namun untuk hasil perhitungan rasio tahun 2023 tidak efisien karena anggaran realisasi belanja lebih besar dibandingkan anggaran realisasi pendapatan.
3. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2020-2023 berdasarkan *Analisis Value For Money* untuk rasio efektivitas berada pada rasio 85%-99% dan masuk ke dalam kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa program/sasaran krgiatan sudah terrealisasi memenuhi target yang ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus lebih mengoptimalkan lagi sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap dana ekstern dapat diminimalisir.
2. Dilihat dari tingkat ekonomis Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan lebih meningkatkan lagi dalam melakukan penghematan anggaran dengan menghindari pengeluaran yang tidak produktif atau mengurangi biaya yang tidak diperlukan dalam mencapai program/kegiatan yang ingin dicapai.
3. Dilihat dari tingkat efisiensi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus lebih memperhatikan perencanaan dan pengendalian realisasi anggaran belanja dibandingkan realisasi anggaran pendapatan.
4. Dilihat dari tingkat efektivitas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk tahun tahun selanjutnya harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
5. Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya menggunakan pengukuran konsep *Value for money* agar mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap APBD baik dari segi pendapatan daerah dan belanja, dan dapat digunakan sebagai landasan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun yang akan datang.

6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan konsep *Value for money* dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 4 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 kabupaten saja tetapi lebih luas lagi. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengukur kinerja suatu organisasi tidak hanya menggunakan tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tetapi perlu ditambah dengan dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andirfa Mulia. 2018. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Lhokseumawe. UNIMAL PRESS.
- Asmika Metik & Sari Oktavia, P. 2022. *Manajemen Kinerja*. Madiun. UNIPMA PRESS.
- Judijanto Loso & Afandy Chairil. 2024. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Solok. PT. Mafy Media.
- Khaeruman. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Serang-Banten. CV. AA RISKI.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. UPP STIM
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. CV. ANDI OFFSET.
- Rahayu. 2020. *Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jakarta. Universitas Prof. Moestopo.
- Sialen Ruth, N, Syamsuransyah & dkk. 2021. *Kinerja Karyawan*. Bandung. CV. Wininda Bhakti.
- Warnaningtyas, H & Rohmatiah, A. 2022. *Penganggaran Perusahaan*. Klaten. CV. Lakeisha.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Indonesia. <http://peraturan.bpk.go.id>. 2022.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah, Asas Ekonomi*. Indonesia. <http://peraturan.bpk.go.id>. 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pendapatan Daerah*. Indonesia. <http://peraturan.bpk.go.id>. 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Indonesia. <http://peraturan.bpk.go.id>. 2008
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indonesia. <http://peraturan.bpk.go.id>. 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indonesia. <http://peraturan.bpk.go.id>. 2020

Skripsi / Jurnal

- Faratama, fani. 2023. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran berdasarkan konsep Value For Money pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi Universitas Islam Riau.
- Hardiansah, Tomi. 2024. *Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2018-2021*. Skripsi Universitas Cendikia Mitra Indonesia Yogyakarta.
- Mahbengi, Syahri. 2017. *Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Putri, Felia. 2021. *Analisis Value For Money pada Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau*. Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Tamara, Debby. 2020. *Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota*

- Medan (Periode 2014-2018). Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Zain, Wardiman. 2018 *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng*. Skripsi Universitas Negeri Makassar
- Diskhamarzeweny, D., Irwan, M., & Dewi, D. K. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan, Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 4(1), 35-49.
- Diskhamarzeweny, D., Dewi, D. K., & Irwan, M. (2023). Pengaruh Self-Determination, Self-Esteem, Self-Efficacy, Optimisme, dan Dukungan Sosial Terhadap Resiliensi Pelaku Umkm Di Kabupaten Kuantan Singingi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Applied Business Administration*, 7(1), 31-40.
- Diskhamarzeweny. (2023). The Role of Experiential Marketing, Perceived Value, and Sharia Service Quality as Determinants of Customer Satisfaction . *Ilomata International Journal of Management*, 4(3), 386-400.
- Diskhamarzeweny, D., Andriani, R., Sapridawati, Y., & Yulis, Y. E. (2023). The Effect Of Trust, Perceived Risk, And Lifestyle On Online Purchase Decisions In E- Commerce. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research (IJBIR)*, 2(2), 151-166.
- Irwan, M., Diskhamarzeweny, D., & Yulis, Y. E. (2024). Evaluation Analysis Of Internal Control Of The Cash Expenditure Accounting System In Bumdes Harapan Makmur, Tebing Tinggi Village. *International Journal of Business and Quality Research (IJBQR)*, 2(3), 180-191.
- Yulis, Y. E., Andriani, R., Diskhamarzeweny, D., Sepridawati, Y., & Irwan, M. (2025). The Effect of The Use of Accounting Information, Utilization of Information Technology, and Loan Capital on the Performance of Micro, Small, and Medium enterprises in Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal)*, 10(01), 64–71.
- Dewi, D. K., Ammar, Z., & Diskhamarzeweny, D. (2020). Pengaruh Independensi, Skeptisme Profesional, Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Inspektorat Provinsi Kabupaten Kuantan Singingi). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 57-67.
- Dewi, D. K., & Diskhamarzeweny, D. (2021). Pengaruh Etika Profesi, Kecerdasan Emosional, Due Professional Care dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 15-25.